

KONFLIK KOMUNIKASI ANTARA PENDUKUNG CALON PRESIDEN 01 DAN 02 DI MEDIA DARING

Mohammad Ali Wafa, Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini menggambarkan terjadinya konflik komunikasi antara Pendukung Calon Presiden 01 dan 02 di Media Daring pada pilpres tahun 2019. Metode penelitian ini, menggunakan metode analisis framing dengan paradigma konstruksionis. Paradigma konstruksionis memandang bahwa tidak ada realitas yang obyektif, karena realitas tercipta melalui proses konstruksi dan pandangan tertentu. (Anggoro 2014). Hasil penelitian menemukan bahwa framing konflik komunikasi antara pendukung calon presiden 01 dan 02 di media daring, pada pemilu 2019, diframing sebagai; media untuk mengurangi angka golput, memperkuat pilihan kepada masing masing pendukung capres cawapres, untuk menciptakan suasana damai dimasyarakat; negara yang ekonominya lemah. Namun kondisi itu diperbaiki dengan mengungkap adanya kinerja Jokowi yang baik; mengajak publik untuk bergembira dalam melihat proses pilpres, dengan menampilkan video lucu, ‘siapa presiden.’; keraguannya pada klamin kubu 02 atas kemenangan Prabowo, dikarenakan data ilmiahnya tidak ditunjukkan ke publik; kecurangan sudah dimulai sebelum pilpres berlangsung. Tuduhan kecurangan pada pemilu 2019 yang dilontarkan kubu 02, merupakan tuduhan yang tidak berdasar, dikarenakan penyelenggaraan pemilunya terbuka dan diawasi oleh berbagai pihak; adanya rencana *people power*, dari kubu 02; keputusan MK yang bersifat final dan mengikat bisa menyudahi perseteruan kedua kubu peserta Pilpres 2019; Tuduhan yang menyatakan kubu 01 sebagai petahana, pasti curang, dinarasikan oleh kubu 02 Denny. Menuding Presiden Jokowi sebagai capres petahana menyalahgunakan kewenangannya dengan memakai anggaran negara untuk kampanye. Namun, soal tuduhan petahana pasti menang, Yusril mengambil contoh saat Megawati yang merupakan petahana ikut kontestasi pilpres kalah. “Jadi tidak selalu petahana itu menang; Yusril Ihza berharap putusan MK mengakhiri persoalan politik yang membelit masyarakat.

Key words: konflik komunikasi, pilpres 2019, calon 01 dan 02.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum tahun 2019, termasuk pemilihan Presiden. Kandidat berlomba memenangkan pemilu. Menarik perhatian pemilih, untuk menentukan kemenangan. Pemenang pemilu akan mendapat kekuasaan dalam pemerintahan. Kandidat berkampanye untuk tujuan memenangkan pemilu.(Fatimah 2018).

Sebelumnya, pada Pilpres 2014, aktor politik, berlomba melakukan manuver politik untuk mendukung capres dan cawapres yang memiliki popularitas, dan elektabilitas tinggi. Iklan politik berpengaruh langsung, minimal pada efek kognitifnya. Pemilih menjadi ingat dan hafal pada capres dan cawapresnya. Iklan

politik dilakukan melalui media televisi, radio, papan reklame, spanduk, baliho, dan lainnya, agar memperoleh popularitas dan elektabilitas yang tinggi. (Suryana 2014). Fenomena ini, dilatarbelakangi oleh perubahan politik di Indonesia. Sejak adanya amandemen UUD 1945, kurun waktu 1999-2002, menandai suksesi kepemimpinan nasional, melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pasal 6A Ayat (1) “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.(Arrsa 2014)

Untuk menjamin terselenggaranya Pemilu 2019 yang efektif, efisien dan kondusif, maka komunikasi politik menjadi faktor yang penting. Komunikasi politik dilakukan melalui media cetak maupun elektronik. Komunikasi politik juga dilakukan dengan pendekatan persuasif oleh tim kampanye Pasangan Calon Presiden. Komunikasi politik dilakukan melalui aktifitas kampanye dengan menawarkan visi misi pasangan calon presiden.(Manubulu and Sudibya 2019)

Pemilihan Umum di Indonesia, dimulai tahun 1955. Memilih DPR dan Konstituante. 260 kursi DPR, dan 520 kursi Konstituante. Kemudian pemilu 1971, memperebutkan kursi DPR pusat dan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Selanjutnya pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999.(Huda and Fadhlika 2018). Kemudian pemilu 2004, 2009, dan 2014.

Gambaran Pemilu di Indonesia awalnya memilih anggota MPR, DPR dan DPRD. Kemudian, setelah amandemen ke-4 UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden. Pilpres yang awalnya dipilih MPR, dirubah menjadi pemilihan langsung. Pilpres dilaksanakan secara langsung mulai tahun 2004. Kemudian, UU Nomor 22 Tahun 2007, menjadikan pemilihan kepala daerah juga secara langsung. (Huda and Fadhlika 2018).

Kesamaan calon presiden Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019 ini, dinilai sebagai tandang ulang. Sejak Pilpres 2014 yang memunculkan dua pasangan calon presiden, dalam debat capres, dinilai menampilkan sikap yang berlebihan terhadap keinginannya untuk berkuasa, sehingga memunculkan dialog sentimen pribadi, dari para pendukung masing-masing calon. Tokoh masyarakat yang kapabilitasnya baik, seolah tidak ingin bergabung kedalam satu kelompok. Akhirnya yang muncul kepermukaan hanya politisi yang mementingkan golongan dan kelompoknya saja. (Huda and Fadhlika 2018).

Perumusan Masalah

Mencermati iklim politik Indonesia di masa kampanye pilpres 2019 yang begitu dinamis, maka permasalahan yang ingin dijawab pada proses penelitian ini adalah: “Bagaimana konflik komunikasi yang terjadi antara pendukung calon presiden 01 dan 02 di media daring?”

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Konflik Komunikasi

Komunikasi dalam konteks ilmu sosial beririsan dengan perspektif interaksionisme simbolik, dalam ilmu sosiologi. Tradisi interaksionisme simbolik, melihat proses komunikasi dan pemaknaan, dianggap sebagai fokusnya. (Littlejohn, 2000:155). Teoretisi interaksionisme simbolik, meyakini bahwa

makna, diciptakan dan dipertahankan melalui interaksi sosial. Interaksionisme simbolik menurut Ball (dalam Littlejohn, 2000: 157) dicirikan sebagai berikut: 1. Seseorang mengambil keputusan dan bertindak, sesuai dengan pengertian yang dipahaminya. 2. Kehidupan sosial merupakan proses interaksi, bukan terstruktur, sehingga selalu berubah dinamis. 3. Seseorang menemukan makna melalui simbol-simbol kelompok, dan bahasa menjadi unsur penting dalam kehidupan sosial. 4. Realitas kehidupan, dibentuk oleh objek sosial, yang nama dan maknanya ditentukan bersama. 5. Tindakan seseorang berdasarkan interpretasi dirinya, yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dipahaminya. 6. Seseorang melihat dirinya, seperti yang digambarkan orang lain, lewat interaksi sosial. Dengan demikian, paradigma interaksionisme simbolik, meyakini bahwa kehidupan sosial manusia ibarat panggung sandiwara. Setiap individu sudah memiliki peran sesuai dengan skenario, yang menyimpang dari skenario memperoleh hukuman. (Isnaini 2018).

Berkaitan dengan itu, Kuper (2000: 156), menyatakan bahwa ilmuwan sosial memahami konflik dalam konteks, adanya hubungan yang saling ketergantungan satu sama lain. Hubungan saling ketergantungan, memerlukan adanya konsistensi yang berupa fenomena keteraturan yang bisa diprediksi. Severin & James (2001 : 155) melihat perilaku manusia ibarat fisika yang teratur dan pasti. Manusia berupaya untuk konsisten dalam bersikap, berperilaku. Interaksi sosial manusia dilakukan dengan cara berkomunikasi. Dalam berkomunikasi sering mengedepankan ambisi. Sehingga seseorang menjadi inkonsistensi, emosioanal, dan sentimental, yang bisa menimbulkan salah pengertian. Adanya salah pengertian dalam proses komunikasi, menjadi penyebab konflik sosial, mulai dari keluarga, tetangga, kelompok, instansi, komunitas, masyarakat, negara, bahkan antarnegara. (Amin 2017).

Ambisi seseorang bisa menyeret orang lain sehingga terbentuk ambisi kelompok. R.D. Nye, menyebut lima penyebab konflik interpersonal yaitu: Kompetisi; Dominasi; Kegagalan; Provokasi; dan Perbedaan Nilai (dalam Rakhmat, 1985 hal. 146). Sementara itu, konflik level negara, bisa karena komunikator, pesan, dan media massa yang dinilai inkonsisten. Penyebab konflik biasanya bersumber pada interaksi sosial dengan pesan yang menghasilkan efek komunikasi yang beraneka ragam. Kemudian, media sebagai penyebab konflik, dikarenakan menyebarkan berita masalah-masalah sosial yang bisa menyeret pada konflik, dan citra buruk masyarakat. Sehingga terjadi proses perubahan sosial. (Amin 2017).

Bungin (2006: 91) melihat perubahan sosial karena alami atau adanya faktor eksternal. Sumber-sumber konflik bisa melalui komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi nonverbal seperti ekspresi muka, kontak mata, mata molotot, posisi tubuh, dan gerakan isyarat. Kuper dkk. (2000), memandang komunikasi nonverbal dapat mengungkapkan emosi seseorang. Sementara itu, Darwin (1872) berpendapat bahwa ekspresi emosi melalui wajah, merupakan respons alamiah, adaptif, dan fisiologis. (Amin 2017).

Ekman dan Friesen (1986) menyatakan, bahwa emosi dengan ekspresi alamiah, bisa dimodifikasi dengan mengatur ekspresi emosi sesuai dengan konteks sosial yang beragam. Kendon (1985) menyatakan gerak isyarat memiliki sifat-

sifat yang sangat berbeda dari ucapan. Oleh karena itu, gerak isyarat hanya untuk menyampaikan tugas-tugas komunikasi tertentu. (Amin 2017).

Fakhrimal, menguraikan hasil penelitiannya: (1) Konflik menjadi ancaman keharmonisan masyarakat dan disintegrasi bangsa. (2) Konflik horizontal menjadi ekspresi ketimpangan sosial; (3) Elit politik yang kalah bersaing bisa menjadi pendorong terjadinya konflik horizontal; (4) Konflik horizontal terjadi, utamanya dikarenakan faktor komunikasi. Namun komunikasi, juga dapat menjadi faktor untuk mencegah konflik; (5) Media massa ikut larut dalam pusaran konflik melalui pemberitaannya; (6) Konflik horizontal cenderung diselesaikan dengan menggunakan pendekatan militer. Sementara itu, masyarakat menginginkan pendekatan humanis; (8) Penyelesaian konflik menyisakan residu seperti dendam dan ketidakadilan. (Amin 2017).

Berkaitan dengan itu, komunikasi konflik terkait studi perdamaian, memposisikan komunikasi menjadi pemicu konflik, yaitu sulitnya mencapai kesepahaman antar pihak. Penyalahgunaan sarana komunikasi. Akses informasi yang terbatas digunakan untuk menyebarkan informasi sesat. Informasi sesat disebarkan melalui media SMS (Short Message System), selebaran, dan tulisan-tulisan di website (Baowollo, 2012). Menurut Alvin Toffler, informasi menjadi komoditas penting dalam memenangkan kepentingan seseorang, kelompok, maupun institusi. (Nuswantoro 2013)

Pruitt dan Rubin, (2004:34-35) menyebutkan tiga kondisi yang mendukung kemunculan *struggle group*, menurut Dahrendorf : yaitu: (1) komunikasi terus-menerus diantara orang-orang yang senasib; (2) adanya pemimpin yang membantu mengartikulasikan ideologi, mengorganisasikan kelompok, dan memformulasikan rencana untuk melakukan tindakan kelompok; (3) meningkatnya legitimasi kelompok dari komunitas yang lebih besar. (Nuswantoro 2013)

Keberhasilan teori *struggle group* ini didukung oleh tipe komunikasi interpretatif dan tipe komunikasi evaluatif. Komunikasi interpretatif bercirikan pesan yang dipertukarkan adalah bentuk pesan sekunder yang sudah diinterpretasikan oleh komunikator. Sedangkan komunikasi evaluatif bercirikan, komunikator mengedepankan prasangka terhadap pihak lain, sehingga pesan yang disampaikan selalu bernada negatif. (Nuswantoro 2013)

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian diperlukan untuk memenuhi kepentingan ilmiah dalam proses menemukan jenis data yang ingin ditemukan, yaitu jenis data kuantitatif dan jenis data kualitatif. Secara metodologis dikenal dua tipe pendekatan. Pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif bertolak dari keyakinan pada prinsip *a priori* dan pendekatan kualitatif bertumpu pada prinsip *aposteriori*. (Imran 2015). Dalam konteks ini peneliti mengambil pendekatan kualitatif.

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis framing dengan paradigma konstruksionis. Paradigma konstruksionis memandang bahwa tidak ada realitas yang obyektif, karena realitas tercipta melalui proses konstruksi dan pandangan tertentu. (Anggoro 2014)

PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai konflik komunikasi antara pendukung calon presiden 01 dan 02 di media daring, pada pilpres 2019, dapat dianalisis sebagai berikut:

Video 1 pada https://www.youtube.com/watch?v=nK_chYJDdho Nobar Debat Pilpres: Bawa Asyik Politik - Final Battle Adian vs Poyuono (Part 1) | Catatan Najwa

Publikasi perdebatan antara pendukung capres 01 dan 02, diframing sebagai media untuk mengurangi angka golput. Juga sebagai media untuk memperkuat pilihan kepada masing masing pendukung capres cawapres. Dengan menampilkan Adian vs Poyuono sebagai komunikator yang tidak ‘baper’, dimaksudkan untuk menciptakan suasana damai dimasyarakat. Makna demikian, dikarenakan pertempuran di media sosial antara pendukung capres 01 dan 02 sudah mencapai tarap konflik komunikasi yang mengkhawatirkan. Disini, Najwa menampilkan komunikator dari kedua kubu yang tidak ‘baper’, bisa menjadi penarik terhadap proses pilpres yang damai.

Video 2 pada <https://www.youtube.com/watch?v=98r72MNmBn4> Nobar Debat Pilpres: Bawa Asyik Politik - Adian: Prabowo Mengeluh Terus (Part 2) | Catatan Najwa

Najwa memframing dengan menyatakan visi misinya Prabowo mengungkapkan kondisi bangsa Indonesia saat ini dalam kondisi parah dan menyimpang dari cita-cita pendiri bangsa. Kekayaan Indonesia, mengalir ke luar negeri. Sementara itu, Najwa juga memframing Sandiaga Uno yang menggambarkan pertumbuhan lapangan kerja tak ada.

Disisi lain, Najwa memframing Jokowi dalam visi misinya menggambarkan bahwa pemerintahannya telah bekerja dan berjuang keras, bagaimana ekonomi Indonesia bertumpu pada pertumbuhan, sekaligus pada pemerataan. Sehingga, model pembangunan infrastruktur dilakukan secara Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Jokowi juga menjelaskan bagaimana program 3 kartunya, bisa digunakan untuk pemerataan ekonomi bangsa Indonesia.

Menanggapi visi misi Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi, ini perdebatan politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu dan politikus Gerindra Arief Poyuono. Najwa memframing dengan menyatakan Arief Poyuono menilai kondisi ekonomi Indonesia memang seperti yang dijelaskan Prabowo, kondisinya lemah dan mengenaskan. Sedangkan, Adian mengomentari, ketika Jokowi sudah bekerja keras untuk bangsa Indonesia, malah, Prabowo bisanya hanya mengeluh dan mengeluh terus. Rakyat tidak memerlukan keluhan keluhan itu. Rakyat butuh solusi. Disini, Najwa memotret pandangan Prabowo yang melihat Indonesia sebagai negara yang ekonominya lemah. Dan mengungkap adanya kinerja Jokowi yang telah memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia tersebut.

Video 3 pada <https://www.youtube.com/watch?v=PnpJd1Xpi14> Debat Pilpres Tanpa Baper: Rematch Adian Napitupulu vs Arief Poyuono | Catatan Najwa

Najwa memframing dengan memberikan pernyataan persuasi dengan pengumuman bahwa Debat pilpres ronde ke-4 kembali mempertemukan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Najwa memframing dengan memberikan pernyataan bahwa *Rematch* (pertandingan ulang) juga terjadi di nobar debat pilpres, dengan menghadirkan pendukung dari kedua kubu, Adian Napitupulu dan Arief Poyuono. Keduanya, saling serang pendapat dan adu argumentasi menambah keseruan nobar debat pilpres. Najwa juga memframing, bagaimana masing-masing pendukung mengunggulkan jagoan capresnya? Lalu, Najwa memframing betapa menariknya perdebatan ini, dengan mengungkapkan Simak "Debat Pilpres Tanpa Baper: Adian Napitupulu vs Arief Poyuono" berikut ini. Disini, Najwa menemukan dua aktor politikus dari kubu 01 dan 02 Adian Napitupulu vs Arief Poyuono. Dua tokoh politik yang bisa menyuarakan suara kubunya masing masing, tanpa nada marah marah.

Video 4 pada <https://www.youtube.com/watch?v=ltoDtNSyoLM> Laga Usai Pilpres: Siap Presiden! (Part 1) | Mata Najwa

Najwa memframing dengan memberikan pernyataan bahwa belakangan ini, muncul video yang memperlihatkan Adian Napitupulu dan politisi dari kubu TKN hormat kepada Jokowi sambil mengatakan, "Siap presiden." Video ini, seakan akan mengolok-olok kubu BPN, karena, sebelumnya ada video serupa "siap presiden" dari kubu prabowo.

Di meja Mata Najwa, Adian menyatakan bahwa video tersebut sah secara konstitusional, karena Jokowi memang masih menjadi presiden. "Kami memang mencoba membangun politik yang dewasa. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Biasa saja, toh nanti juga ada orang yang kubunya biasa kalah. Tetapi kami pemenang tentunya wajib merangkul yang kalah," ujarnya. Menanggapi video "Siap Presiden", politisi dari kubu 01 Arief Poyuono mengatakan tidak ada masalah. "Karena sampai saat ini Pak Jokowi masih presiden. Tetapi nanti Oktober, Pak Jokowi tidak lagi presiden," kata Arief. Arief mengatakan ia tetap memanggil Prabowo sebagai presiden, karena kubunya masih percaya Prabowo menang Pilpres 2019. "Kami tidak mengaku-ngaku jadi presiden, kami mengklaim kami menang." Disini, Najwa mengajak publik untuk bergembira dalam melihat proses pilpres, dengan menampilkan video lucu, 'siap presiden.'

Video 5 pada <https://www.youtube.com/watch?v=-vpUvEPZQHI> Laga Usai Pilpres - Arief Poyuono: Kami Diancam (Part 2) | Mata Najwa

Framing yang dilakukan oleh jurnalis Najwa Shihab, dengan mengungkapkan narasi yang berbunyi 'hasil hitung cepat Pilpres 2019 menjadi sorotan BPN, hingga kini BPN menganggap hasil hitung cepat lembaga survei tidak valid berdasarkan sejumlah tuduhan.' Pada poin ini Najwa menunjukkan adanya konflik komunikasi antara kubu 02 dengan lembaga survei, yang hasil penelitiannya menunjukkan kemenangan kubu 01.

Najwa juga mengungkapkan, BPN juga mengklaim kemenangan Prabowo-Sandi berdasar penghitungan real count yang dilakukan BPN. Namun, hingga dua pekan setelah pencoblosan, lokasi pengolahan data real count BPN masih dirahasiakan. Pada poin ini, Najwa memframing keraguannya pada klaim kubu 02 atas kemenangan Prabowo, dikarenakan data ilmiahnya tidak ditunjukkan ke publik.

Keraguan Najwa atas klaim kemenangan Prabowo, dijawab oleh kubu 02 Arief Poyuono, politisi pendukung Prabowo-Sandi. Ia menyatakan bahwa lokasi pengolahan data real count sengaja dirahasiakan karena ada yang mengancam pihak 02. “Kami tidak ingin memperlihatkan bagaimana cara atau tempat menghitung C1 karena ada ancaman dari pihak Jokowi, tapi bukan dari partai,” kata Arief. Pada poin ini, Najwa mencoba memframing tentang klaim kemenangan pilpres, dengan menghadirkan argumen yang berbeda dari masing-masing kubu. Kubu 01, klaim kemenangan berdasarkan quick count. Sedangkan kubu 02, klaim kemenangannya berdasarkan real count.

Najwa juga memframing, kecurigaannya pada data real count kubu Prabowo, dengan menghadirkan komentar dari kubu 01, melalui narasi, ‘soal ancaman kepada kubu Prabowo, Adian Napitupulu dari kubu 01 mengatakan kalau Indonesia itu negara hukum. “Beritahu, ancaman dari siapa, dan laporkan. Jangan bicara di media saja,” kata Adian. Lebih lanjut Adian mengatakan pengawas pemilu dari 33 negara sudah bilang pemilu di Indonesia berjalan baik dan tidak ada kecurangan. “Jadi jangan tuding sana sini curang. Kita tunggu saja tanggal 22 Mei,” katanya. Pada poin ini Najwa ingin menjelaskan, bahwa klaim kemenangan dari masing-masing kubu, masih diragukan, terutama dari kubu Prabowo. Disini, Najwa menampilkan gambaran kondisi bertahan dari kubu Jokowi yang memenangkan pilpres menurut survei hitung cepat, dari serangan kubu Prabowo yang mengklaim kemenangan menurut real count yang dibuatnya sendiri.

Video 6 pada <https://www.youtube.com/watch?v=YvMAhjFo48c> Laga Usai Pilpres: Prabowo-Sandi Tak Akan Akui Legitimasi Pemilu? (Part 3) | Mata Najwa

Framing kecurangan pemilu yang dilontarkan kubu 02, juga disorot oleh Najwa Shihab. Najwa mempublikasikan narasi yang berbunyi ‘Sejak masa kampanye, BPN telah menyuarakan adanya potensi kecurangan pemilu, saat itu yang dipersoalkan masalah DPT yang dinilai janggal, hingga Hashim Djojohadikusumo dua kali mendatangi KPU melaporkan hal itu. Pada poin ini Najwa ingin mengungkapkan, kubu 02 menyampaikan narasi kecurangan sudah dimulai sebelum pilpres berlangsung.

Kemudian, Najwa memperkuat argumennya dengan menyatakan, ‘Jelang pemungutan suara dan setelah pemungutan suara, tudingan kecurangan kembali dilontarkan oleh BPN, kasus yang diangkat di antaranya surat suara tercoblos Malaysia.

Untuk menampik tuduhan kecurangan tersebut, Najwa memframing dengan jawaban kubu 01 atas tuduhan kecurangan tersebut, dengan menyampaikan narasi berikut ini. ‘Menurut Adian Napitupulu, pihaknya tidak menampik adanya kecurangan karena pemilu dilakukan secara serentak dan dengan 800.000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. “Penyelenggara lengkap, pengawas ada, dari

dalam negeri dan asing. Dari tiap partai juga ada. KPU saja dipilih parlemen. Jangan memonopoli kebenaran dan menuduh KPU, Bawaslu, tunggu saja pengumuman resmi,” kata Adian.’ Pada poin ini, Najwa ingin menjelaskan bahwa tuduhan kecurangan pada pemilu 2019 yang dilontarkan kubu 02, merupakan tuduhan yang tidak berdasar, dikarenakan penyelenggaraan pemilunya terbuka dan diawasi oleh berbagai pihak.

Najwa juga memframing, bahwa tuduhan kubu 02 terhadap kecurangan pilpres, bukan tuduhan abal abal. Najwa memframingnya melalui narasi, yang dipublikasikan sebagai berikut, ‘Mengenai tuduhan, pendukung kubu 02 Arief Poyuono mengatakan ini bukan tuduhan, tetapi memang fakta. “Ada videonya. Bicara kecurangan ada faktanya. Buktinya saja KPU salah input data, ribuan salah input dan suara kami yang dikurangi. Ini pidato Prabowo warning, ini bisa potensi rusuh. Ini kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Saya tidak menuduh TKN curang, tapi pemilik modal ya yang masih ingin Jokowi menang,” katanya.’ Poin ini, Najwa ingin menyampaikan, tuduhan kubu 02 ini tidak main-main. Najwa memberikan argumen dengan adanya isi pidato Prabowo yang menyatakan kecurangan bisa mendorong potensi rusuh. Disini, Najwa menggambarkan tuduhan kecurangan pemilu 2019 dari kubu 02, berawal dari faktor DPT. Tuduhan tersebut dibantah oleh KPU, yang mengatakan DPT sudah disepakati bersama partai peserta pemilu, termasuk Gerindra.

Video 7 pada <https://www.youtube.com/watch?v=pqJ5XPALvFM> Laga Usai Pilpres: “People Power” Usai Pencoblosan (Part 4) | Mata Najwa

Disini, Najwa memframing masalah tuduhan kecurangan pemilu yang dilontarkan oleh kubu 02 semakin menguat. Najwa menyampaikan narasinya bahwa ‘Isu kecurangan Pilpres 2019 juga diramaikan dengan wacana *people power*. Wacana ini disuarakan oleh pendukung Prabowo-Sandi seperti Amien Rais, Eggi Sudjana dan Rizieq Shihab. Pada poin ini, Najwa ingin menyampaikan akibat lanjut dari adanya kecurangan pemilu yang dituduhkan kubu 02, akan berakibat pada adanya *people power*, dari kubu 02.

Lebih lanjut, Najwa ingin memframing *people power* yang dipahami oleh kubu 02, dengan narasinya sebagai berikut, ‘Wacana ini membuat Eggi Sudjana diperiksa oleh pihak kepolisian. Eggi Sudjana mengatakan dirinya diperiksa polisi untuk dimintai klarifikasi. Menurut Eggi, ia tidak menampik mewacanakan soal *people power*. “Jadi kalau ada kecurangan, memungkinkan *people power*. Jadi, kami sudah melaporkan kecurangan ke KPU. Kalau terbukti curang ya tidak perlu ada tahapan.’ Disini, Najwa ingin menunjukkan *people power* yang dipahami kubu 02 adalah jika terjadi kecurangan, maka Prabowo yang harus dilantik jadi Presiden, tanpa harus mengikuti adanya tahapan dalam pemilu.

Framing tentang makna *people power* menurut kubu 01 dan kubu 02, juga dipublikasikan oleh Najwa, dengan narasinya ‘Ini ada buku soal Jokowi yang mengatakan *people power*, padahal tidak ada kondisi otoriter tapi tidak diperiksa. Lah, saya bilang ini kok dipolisikan,” kata Eggi. Sementara itu, Guntur Romli dari pendukung kubu 01, mengatakan, “*People power* itu terjadi di era 98, saat kondisinya dalam keadaan otoriter. Saat ini, pemilu digelar secara terbuka. Semua bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, tidak perlu gerakan *people power*. Kenapa

diperiksa polisi, karena mengadu domba seperti HRS yang mengajak mengepung KPU,” kata Guntur.’

Video 8 pada <https://www.youtube.com/watch?v=vUnzCSfDJgQ> Laga Usai Pilpres - Prabowo: Kambing atau Rakyat yang Terhormat? (Part 5) | Mata Najwa

Najwa memframing Prabowo dengan narasi yang dipublikasikan berbunyi ‘Prabowo Subianto memberikan pidato di hadapan ribuan buruh saat perayaan Hari Buruh Sedunia di Jakarta. Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan jangan mau diperlakukan seperti kambing dan setiap bentuk kecurangan harus dilawan.’ Poin ini Najwa ingin menyampaikan bahwa yang melontarkan isu kecurangan pemilu tidak hanya pendukung Prabowo, tetapi Prabowonya sendiri ikut menyuarakan adanya kecurangan dalam pemilu 2019.

Berkaitan persoalan ini, Najwa memframingnya dengan jawaban dari kubu 01, yang narasinya ‘Soal pidato Prabowo, pendukung 01 Adian Napitupulu mengatakan pihaknya tetap santai menanggapi hal itu. “Biarkan saja mereka itu mengklaim kemenangan. Toh suka atau tidak, nanti Jokowi tetap akan jadi presiden. Jadi kalau belum terbukti, jangan apa-apa dibilang curang.” katanya.’

Perdebatan yang menilai Prabowo suka marah marah, Najwa memframingnya dengan narasi ‘Eggi Sudjana, pendukung 02 mengatakan agar pihak TKN tidak perlu menilai atau menuduh pribadi orang yang tidak dikenalnya dengan baik. “Bagi kami yang mengerti Prabowo, itu memang wataknya. Dia marah karena ada kecurangan,” kata Eggi. Pandangan Eggi ditolak oleh pendukung 01, Guntur Romli yang mengatakan Prabowo menggunakan diksi-diksi yang menghasut masyarakat.’

Video 9 pada <https://www.youtube.com/watch?v=r0u4oGIwOOA> Laga Usai Pilpres: Ijtima Ulama Jadi Badan Pemenangan 02? (Part 6) | Mata Najwa

Najwa Shihab memframing isu pemilu 2019 dengan isu Ijtima Ulama. Najwa menarasikan ‘Ijtima Ulama digelar dalam jilid yang ketiga untuk menentukan langkah BPN dalam menanggapi hasil Pilpres 2019. Hasil ijtima tersebut menyatakan terdapat kecurangan dalam Pilpres 2019 sehingga pasangan kubu 01 harus didiskualifikasi. Soal apakah itu suara BPN atau Ijtima Ulama, pendukung 02, Eggi Sudjana mengatakan, itu suara ulama yang memang sejak awal mendukung Prabowo-Sandi.’ Pada poin ini Najwa memframing keraguannya, ulama yang dalam konteks sosialnya berperan mengayomi umat, kenapa kok, hanya mendukung salah satu capres, yaitu capres 02.

Najwa juga memframing adanya klaim istilah ulama dari kedua kubu, dengan narasinya, “‘Kami sudah datang ke DKPP untuk memeriksa KPU dan Bawaslu dan mendiskualifikasi pasangan 01. Ini representasi suara umat Islam,” kata Eggi. Sementara, Guntur Romli politisi pendukung 01 membantah kalau Ijtima merupakan kelompok ulama. “Itu BPN. Bukan ulama. Ulama itu ada NU, jangan bilang suara umat Islam,” katanya.’ Disini, Najwa mencoba menerangkan adanya perbedaan pemahaman antara klaim istilah ulama. Klaim istilah ulama, dinilai banyak mengandung politik identitas.

Berkaitan dengan itu, framing Najwa dengan narasinya terkait politik identitas menyatakan ‘Mengenai perdebatan itu, Adian Napitupulu dan Arief Poyuono sepakat untuk tidak membicarakan persoalan politik identitas. “Dulu saat reformasi, kita sama-sama menjatuhkan Soeharto dan Cendana dengan *people*

power bulan Mei dan sekarang menantunya sepertinya akan menjatuhkan Jokowi dengan *people power* di bulan yang sama pula. Kita sama-sama membicarakan republik, tapi jangan sampai ada “cendana” di antara kita,” kata Adian.’

Video 10 pada https://www.youtube.com/watch?v=9ON1ZJV4K_s Laga Usai Pilpres: Najwa Pegangi Tangan Adian dan Poyuono (Part 7) | Mata Najwa

Framing gambaran capres 02 dinyatakan dengan narasi ‘Menurut Adian Napitupulu, Prabowo tetaplah personifikasi Orde Baru karena mempunyai anak yang lahir dari trah Cendana. Pandangan ini ditolak oleh Arief Poyuono yang mengatakan persoalan politik tidak ada urusannya dengan hubungan darah. “Itu adiknya Mega saja di kubu kami,” katanya.

Konflik komunikasi antara kedua kubu, di framing Najwa dengan menggambarkan situasi ‘Debat panas di antara keduanya terus berlangsung, sampai-sampai tuan rumah Mata Najwa, Najwa Shihab memegang tangan keduanya untuk meredakan tensi. Berhasilkah?’ Poin ini, Najwa ingin menerangkan, betapa situasi debat yang menegangkan.

Konflik komunikasi terkait bagaimana mengakhiri sengketa pilpres 2019 ini, Najwa memframing dengan perdebatan kedua kubu ‘Di penghujung dialog, dibahas kapan laga usai Pilpres 2019 berakhir. Pendukung 02, Eggi Sudjana menyatakan tidak ingin menyelesaikan sengketa Pilpres 2019 melalui sengketa di MK. Hal itu dianggap Guntur Romli menyalahi aturan. “Kalau MK sudah memutuskan ya sudah selesai,” jelasnya.’

Video 11 pada https://www.youtube.com/watch?v=Qgb4vX9BsGA&list=PL2VXOB_zPEPwil1UszowiZzUn0WiHuNNC Babak Akhir Pilpres: Klaim Menang Dua Kubu (Part 1) | Mata Najwa

Najwa memframing betapa lelahnya mengikuti perseteruan antara kubu capres 01 dan 02. Najwa menggambarkannya dengan narasi ‘Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PPHU) Pilpres 2019 yang berlangsung di MK sudah selesai digelar. Kini publik tinggal menunggu keputusan final dari MK, siapa yang menjadi pemenang sengketa pilpres tersebut. Akankah keputusan MK yang bersifat final dan mengikat akan menyudahi perseteruan dua kubu peserta Pilpres 2019?’

Najwa menarasikan klaim kemenangan atas sengketa pilpres 2019 pada sidang MK, dengan teks ‘Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana mengatakan pihak yakin akan memenangkan sengketa ini. Menurut Denny, pendekatan timnya bukan TSM, tapi kecurangan dalam Pilpres 2019. “Asas rahasia itu sudah dilanggar. Misalnya arahan memakai baju putih. Itu kan intimidatif secara psikologis. Soal kecurangan misalnya penyelewengan anggaran. Kami yakin majelis hakim MK akan melihat itu,” kata Denny’.

Terkait klaim kubu capres 02 tersebut, Najwa juga mencoba mengungkapkan pendapat yang lain, berupa pernyataan dari kubu capres 01 dengan ungkapan ‘Sementara itu, Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril Iha Mahendra mengatakan dalil-dalil yang dikatakan Denny Indrayana sudah disanggah di persidangan. “Saya menyilakan pembuktian kecurangan itu. Buktikan. Saya awalnya penasaran dengan tuduhan kecurangan yang dituduhkan. Tapi justru saya tercengang. Mulai dari bukti dan saksi dari kubu 02 tidak

menerangkan kecurangan apa-apa. Bukti dari pemohon sangat lemah,” kata Yusril.

Video 12 pada <https://www.youtube.com/watch?v=0X0U0JYjbPg> Babak Akhir Pilpres: Adu Kuat Saksi dan Bukti (Part 2) | Mata Najwa

Framing Najwa memframing ‘Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana mengatakan saksi-saksinya bisa membuktikan kecurangan yang dilakukan pasangan capres 01. Menurut Denny, gugatan pihaknya berdasarkan pada argumen kualitatif dan kuantitatif. “Saksi-saksi yang di bawah ancaman, soal ketidaknetralan aparat itu tidak bisa hadir. Jika mereka hadir, ini terkait keselamatan dan keamanan sebelum dan sesudah sidang. Selain itu, ini bukan soal kuantitas, tapi soal asas ketidakjujuran, kecurangan dan intimidasi,” ujarnya.

Pernyataan kubu 02 tersebut dimentahkan oleh kubu capres 01, melalui framing Najwa ‘Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra mengatakan prihatin jika memang ada ancaman. Namun hal penting dalam persidangan adalah soal pembuktian adanya kecurangan’.

Demikian juga pernyataan dari KPU yang membantah tuduhan kubu 02, yang dinarasikan Najwa sebagai berikut ‘Sementara itu, Komisioner KPU Pramono Ubaid mengatakan berdasarkan kajian dari Bawaslu, soal adanya tuduhan KPPS mengarahkan untuk mencoblos itu hanya membantu. “Kajian Bawaslu itu pelanggaran administrasi. Bawaslu rekomendasinya pemungutan ulang. Artinya sudah selesai,” ujarnya.

Video 13 pada <https://www.youtube.com/watch?v=ep5esHgZXx8> Babak Akhir Pilpres: Ada Apa dengan DPT? (Part 3) | Mata Najwa

Najwa memframing sengketa pemilu di MK terkait DPT. Persoalan DPT invalid menjadi salah satu poin gugatan dari tim hukum Prabowo-Sandi. Dalam sidang sengketa pilpres di MK, perdebatan soal DPT berlangsung sengit. Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan, saksi Idham berhasil membuktikan ada 22 juta DPT bermasalah, di antaranya anak di bawah umur. “Sejak awal kami sudah rewel mengatakan itu, tapi KPU hanya iya-iya saja. Kami minta C7 saja untuk dibawa ke MK, KPU tidak mau bawa. Kenapa? Itu kan daftar pemilih ke TPS,” tegas Andre.

Semua tuduhan kubu 02 tentang DPT dibantah oleh KPU. Komisioner KPU, Pramono Ubaid menjelaskan tidak semua data yang dimiliki oleh BPN itu sama dengan KPU. “Dulu bilang 6,1 juta, dibawa ke KPU, baru dibuka hanya 3,16 juta dan yang utuh hanya 2,6 juta. Itu mereka BPN yang buka di KPU. Tidak semua yang diklaim BPN di MK, itu punya KPU. Yang benar hanya 130 ribu,” sanggah Pramono.

Video 14 pada <https://www.youtube.com/watch?v=v114B2-1ruU> Babak Akhir Pilpres - Refly Harun: Bad News untuk Prabowo-Sandi (Part 4) | Mata Najwa

Najwa memframing bahwa putusan MK akan memenangkan kubu 01, melalui pernyataan netral dari pakar hukum. Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan apapun perdebatan yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf, tidak akan mengubah putusan MK. Menurut Refly, majelis hakim MK sudah punya putusan sejak awal. “Ini Bad News. Posisi paling sulit itu di pemohon. Mereka mendalilkan hal yang besar, tapi dalam persidangan itu tidak

muncul. Lalu soal TSM, dengan paradigma hitung-hitungan, itu tidak bisa dibuktikan. The Game is Over,” kata Refly.

Sementara itu, kubu 02 tidak sependapat dengan pernyataan pakar hukum Refly Harun. Jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan soal TSM itu sudah dapat dibuktikan dengan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan yang menempelkan stigma kalau Prabowo-Sandi itu didukung Islam garis keras. “Akhirnya di daerah-daerah non muslim, Prabowo-Sandi kalah. Itu kan TSM. Fakta,” katanya.

Pendapat kubu 02 Andre Rosiade dibantah oleh kubu 01. Soal ini Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra mengatakan tuduhan itu harus dibuktikan. “Kejahatan itu kan selalu meninggalkan jejak. Ya buktikan saja,” kata Yusril.

Najwa juga memframing masalah kecurangan DPT, dari suara kelompok netral. Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan DPT harus diakui dari pemilu ke pemilu mengalami perbaikan. Menurut Titi, Pemilu 2019 ini mengalami banyak perbaikan karena yang terlibat banyak, bahkan bawaslu atau pengawas pun ada hingga tingkat TPS. “Kalau bertanya jurdil atau tidak parameternya kan besar sekali. Tak bisa 100%, tapi harus menempatkan konteksnya. Pemilu 2019 ini adalah Pemilu terberat, karena harus adaptasi dengan aturan-aturan baru,” ujar Titi.

Video 15 pada <https://www.youtube.com/watch?v=oolXpw8N3jw> Babak Akhir Pilpres - BPN: Petahana Selalu Diuntungkan (Part 5) | Mata Najwa

Framing yang menyatakan kubu 01 sebagai petahana, pasti curang, dinarasikan oleh kubu 02 Denny. Tim hukum Prabowo-Sandi menuding Presiden Jokowi sebagai capres petahana menyalahgunakan kewenangannya dengan memakai anggaran negara untuk kampanye. Menurut tim hukum Prabowo-Sandi, penyelewengan itu terlihat dalam kebijakan menaikkan gaji PNS dan perangkat daerah serta mencairkan dana bansos. Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana mengatakan tidak usah sulit-sulit membuktikan penyelewengan anggaran. “Lihat saja soal kenaikan uang rapelan ASN dipepetkan pertengahan April. Pak Jokowi mengatakan tidak mau Juni, maunya April. Artinya program-program pemerintah itu diarahkan untuk memenangkan capres petahana. Kontestasi politik ini tidak mengedepankan asas kesetaraan, petahana didukung aparat dan anggaran negara,” ujar Denny.

Pendapat Denny tersebut, dibantah oleh Yusril kubu 01 dengan argumennya. Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra sudah menduga kalau petahana pasti mendapat sangkaan seperti itu. Menurut Yusril, aturan di Indonesia memang membolehkan presiden mengikuti kontestasi pilpres setelah menjabat satu periode. Soal tuduhan petahana pasti menang, Yusril mengambil contoh saat Megawati yang merupakan petahana ikut kontestasi pilpres kalah. “Jadi tidak selalu petahana itu menang. Kita lihat saja nanti putusan MK,” jelasnya.

Video 16 pada <https://www.youtube.com/watch?v=OLUjTyinQTM> Babak Akhir Pilpres: BPN: Sejak Awal Prabowo-Sandi Tidak Ingin ke MK (Part 6) | Mata Najwa

Najwa juga memframing, ternyata kubu 02 juga mau berperkara ke MK, sebagai penyelesaian konflik pemilu. Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan mengajukan sengketa pilpres ke MK bukan karena persoalan menang kalah. “Tapi tujuannya memperbaiki pemilu ke depannya. Sejak awal Prabowo-Sandi tidak mau ke MK, tapi rakyat yang mendorong,” ujar Andre. Mengajukan ke MK, kata Andre adalah jalan mengikuti konstitusi.

Najwa juga memframing tuduhan kecurangan yang dilakukan KPU tidak benar. Komisioner KPU, Pramono Ubaid membenarkan kalau Pemilu 2019 ini sangat berat karena banyak aturan baru. Ia mengakui ada kekeliruan. Namun, tudingan soal kecurangan yang dialamatkan ke KPU adalah salah alamat. “Konsepsi UU kita kan penghitungan berjenjang. Tapi KPU berinisiatif membuat situng untuk kebutuhan informasi. Dalam PKPU, Situng tidak kita masukkan sebagai bagian dalam proses pemilu. Jadi kalau situng dipersoalkan itu salah alamat. Begitu juga DPT, itu sudah selesai,” katanya.

Najwa juga memframing argumen kubu 02 bahwa memang ada kecurangan yang dilakukan KPU pada pemilu 2019. Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana mengatakan jika persoalan DPT sudah selesai, mengapa masih banyak DPT yang invalid. “Mudahnya, Pilpres 17 April, tapi penetapan DPT bulan Mei. Di mana selesainya? Kami bilang 22 juta invalid. Kalau KPU bilang sudah selesai, makanya buka C7-nya. KPU bilang tidak berpengaruh dengan hasil, prinsip pemilu rahasia kok kami harus membuktikan hasilnya,” kata Denny.

Video 17 pada <https://www.youtube.com/watch?v=AQzkQVrCzTU> Babak Akhir Pilpres: Menyambut Putusan MK (Part 7) | Mata Najwa

Najwa memframing kegalauannya tentang konflik komunikasi antara kubu 01 dan 02 yang tiada henti. Drama Pilpres 2019 telah memasuki babak akhir dengan tuntasnya persidangan sengketa hasil pilpres di MK. Apakah ini akan menjadi akhir dari perselisihan antar elite dan polarisasi di masyarakat? Dan apakah keputusan MK akan menjadi hasil final yang diterima kedua kubu?

Berkaitan dengan itu, Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza berharap putusan MK mengakhiri persoalan politik yang membelit masyarakat. Baginya, sebagai bangsa yang besar, kita harus berbesar hati untuk menerima apapun hasilnya. “Kalau analisa saya, berdasarkan persidangan di MK, pemohon tidak bisa membuktikan gugatannya. Jadi ya akan ditolak. Tapi kita harus menerima apapun putusan MK. Soal politik, bisa saja kami yang membela mati-matian, tapi kubu yang kami lawan yang menikmati. Politik itu bisa berbalik,” kata Yusril.

KESIMPULAN

Berkaitan dengan pembahasan tersebut di atas, dapat diberikan kesimpulan, bahwa konflik komunikasi antara pendukung calon presiden 01 dan 02 di media daring, pada pemilu 2019, sebagai berikut:

Publikasi perdebatan antara pendukung capres 01 dan 02, diframing sebagai media untuk mengurangi angka golput, memperkuat pilihan kepada masing masing pendukung capres cawapres, untuk menciptakan suasana damai

dimasyarakat. Dikarenakan, Najwa menampilkan komunikator dari kedua kubu yang tidak 'baper'.

Najwa memotret pandangan Prabowo yang melihat Indonesia sebagai negara yang ekonominya lemah. Namun kondisi itu diperbaiki dengan mengungkap adanya kinerja Jokowi yang baik. Sehingga perdebatan ini menjadi menarik. Diberi judul "Debat Pilpres Tanpa Baper: Adian Napitupulu vs Arief Poyuono", dua aktor politikus dari kubu 01 dan 02. Dua tokoh politik yang bisa menyuarakan suara kubunya masing masing, tanpa nada marah marah.

Najwa memframing dengan memberikan pernyataan bahwa belakangan ini, muncul video yang memperlihatkan Adian Napitupulu dan politisi dari kubu TKN hormat kepada Jokowi sambil mengatakan, "Siap presiden." Video ini, seakan akan mengolok-olok kubu BPN, karena, sebelumnya ada video serupa "siap presiden" dari kubu Prabowo. Disini, Najwa mengajak publik untuk bergembira dalam melihat proses pilpres, dengan menampilkan video lucu, 'siap presiden.'

Najwa menunjukkan adanya konflik komunikasi antara kubu 02 dengan lembaga survei, yang hasil penelitiannya menunjukkan kemenangan kubu 01. Najwa memframing keraguannya pada klaim kubu 02 atas kemenangan Prabowo, dikarenakan data ilmiahnya tidak ditunjukkan ke publik. Najwa mencoba memframing dengan menghadirkan argumen yang berbeda dari masing masing kubu. Kubu 01, klaim kemenangan berdasarkan quick count. Sedang kubu 02, klaim kemenangannya berdasarkan real count. Najwa ingin menjelaskan, klaim kemenangan dari masing masing kubu, masih diragukan, dikarenakan basis argumennya yang berbeda. Kubu Jokowi mendasarkan pada hasil survei hitung cepat. Sementara kubu Prabowo mendasarkan pada hasil real count yang dibuatnya sendiri.

Selanjutnya, Najwa ingin mengungkapkan, kubu 02 menyampaikan narasi kecurangan sudah dimulai sebelum pilpres berlangsung. Tuduhan kecurangan pada pemilu 2019 yang dilontarkan kubu 02, merupakan tuduhan yang tidak berdasar, dikarenakan penyelenggaraan pemilunya terbuka dan diawasi oleh berbagai pihak. Namun demikian, Najwa juga ingin menyampaikan, bahwa tuduhan kubu 02 tersebut tidak main-main. Hal ini dikarenakan isi pidato Prabowo sebagai pimpinan puncak dari kubu 02, yang menyatakan bahwa kecurangan bisa mendorong potensi rusuh.

Najwa menggambarkan tuduhan kecurangan pemilu 2019 dari kubu 02, berawal dari faktor DPT. Meskipun tuduhan tersebut dibantah oleh KPU, yang mengatakan DPT sudah disepakati bersama oleh partai peserta pemilu, termasuk partai Gerindra. Akibat lanjutan dari adanya kecurangan pemilu yang dituduhkan kubu 02, akan berakibat pada adanya rencana *people power*, dari kubu 02. *People power* yang dipahami kubu 02 adalah jika terjadi kecurangan, maka Prabowo yang harus dilantik jadi Presiden, tanpa harus mengikuti adanya tahapan dalam pemilu. Pemikiran seperti ini menjadi serius, dikarenakan yang melontarkan isu kecurangan pemilu tidak hanya pendukung Prabowo, tetapi Prabowonya sendiri juga ikut menyuarakan adanya kecurangan dalam pemilu 2019. Apalagi ditambah dengan istilah politik identitas yang dilekatkan kepada ulama, yang dalam konteks sosialnya berperan mengayomi umat, kenapa hanya mendukung salah satu capres, yaitu capres 02.

Disamping itu, Najwa memframing, akankah keputusan MK yang bersifat final dan mengikat bisa menyudahi perseteruan kedua kubu peserta Pilpres 2019? Kubu Prabowo-Sandi, Denny Indrayana mengatakan pihaknya yakin akan memenangkan sengketa pilpres ini. Saksi-saksinya bisa membuktikan kecurangan yang dilakukan pasangan capres 01. Namun Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra mengatakan dalil-dalil yang dikatakan Denny Indrayana sudah disanggah di persidangan. Hal terpenting dalam persidangan adalah soal pembuktian adanya kecurangan'. Salah satu poin gugatan kubu Prabowo-Sandi, dalam sidang sengketa pilpres di MK, adalah perdebatan soal DPT. Komisioner KPU, Pramono Ubaid menjelaskan tidak semua data yang dimiliki BPN, sama dengan data dari KPU.

Najwa memframing bahwa putusan MK akan memenangkan kubu 01, melalui pernyataan netral Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun. Apapun perdebatan dari kubu Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf, tidak akan mengubah putusan MK. "Ini Bad News. Bagi kubu 02.

Tuduhan yang menyatakan kubu 01 sebagai petahana, pasti curang, dinarasikan oleh kubu 02 Denny. Menuding Presiden Jokowi sebagai capres petahana menyalahgunakan kewenangannya dengan memakai anggaran negara untuk kampanye. Namun, soal tuduhan petahana pasti menang, Yusril mengambil contoh saat Megawati yang merupakan petahana ikut kontestasi pilpres kalah. "Jadi tidak selalu petahana itu menang. Dari pihak KPU mengatakan tuduhan kecurangan yang dilakukan KPU melalui situng, tidak benar. Dalam PKPU, Situng tidak dimasukkan sebagai bagian dalam proses pemilu. Jadi kalau situng dipersoalkan itu salah alamat.

Najwa memframing apakah keputusan MK akan menjadi hasil final yang diterima kedua kubu? Yusril Ihza berharap putusan MK mengakhiri persoalan politik yang membelit masyarakat. Sebagai bangsa yang besar, harus berbesar hati untuk menerima apapun hasilnya. Begitu juga, Jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan apapun putusan MK, pendukung Prabowo-Sandi harus menerima dengan tenang dan tidak perlu turun ke jalan untuk menuntut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Totok Wahyu, and Ridlaty Ayu Oktaviana Putri. 2016. "Media Dan Perilaku Pemilih Pemula Pada Pilihan Presiden Tahun 2014 Di Kabupaten Sidoarjo." *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5(1): 87.
- Amin, M Ali Syamsuddin. 2017. "KOMUNIKASI SEBAGAI PENYEBAB DAN SOLUSI KONFLIK SOSIAL." *Jurnal Common* 1(2).
- Anggoro, Ayub Dwi. 2014. "MEDIA, POLITIK Dan KEKUASAAN (Analisis Framing Model Robert N. Entman Tentang Pemberitaan Hasil Pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 Di TV One Dan Metro TV)." *Jurnal Aristo* 2(2): 25–52.
- Arrsa, Ria Casmi. 2014. "Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi." *Konstitusi* 11(3).
- Bachri, Bachtiar S. 1986. "MEYAKINKAN VALIDITAS DATA MELALUI TRIANGULASI PADA PENELITIAN KUALITATIF."
- Bashatah, Nahid Saeid. 2017. *Framing Analysis of British Newspaper Representation of Saudi Women from 2005-2013*.
- Fatimah, Siti. 2018. "Kampanye Sebagai Komunikasi Politik : Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu." *Resolusi* 1(1): 5–16.
- Fitri, Sherly Nelsa. 2018. "Pro Kontra Gerakan Tagar # 2019GantiPresiden Sebagai Sarana Kampanye Dalam Pemilu." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4(2).
- Huda, Khoiril, and Zulfa Azzah Fadhlika. 2018. "Pemilu Presiden 2019 : Antara Kontestasi Politik Dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa." *Fakultas Hukum universitas Negeri Semarang* 4(3): 547–62.
- Imran, Hasyim Ali. 2015. "Penelitian Komunikasi Pendekatan Kualitatif Berbasis Teks." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 19(1): 129.
- Isnaini, Santi. 2018. "Konflik Dan Negosiasi Di Dalam Perspektif: Arsitektur, Sosiologi, Teknologi Dan Komunikasi." *Bricolage* 4(1): 32–50.
- Junaidi, Ahmad. 2017. "Media Dan Keberagaman : Analisis Pemberitaan Media Daring Seputar Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 1(1): 329–37.
- Manubulu, Isakh Benyamin, and Komang Pradnya Sudibya. 2019. "ANALISIS KONTEKSTUALITAS KOMUNIKASI POLITIK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA." *Fakultas Hukum Universitas Udayana*: 1–20.
- Mulawarman, and Aldila Dyas Nurfitri. 2017. "Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan." *Buletin Psikologi* 25(1): 36–44.
- Nuswantoro, A. Ranggabumi. 2013. "Media Massa Dalam Situasi Konflik : Dari Bandwagon Effect Sampai Peace Narrative." *Jurnal Komunikasi* 1(6): 503–16.
- Safitri, Retno Ayu. 2016. "Perilaku Memilih Masyarakat Muslim Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kecamatan Kapas , Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Politik muda* 5(2): 247–55.
- Suryana, Nana. 2014. "Iklan Politik, Popularitas, Dan Elektabilitas Calon Presiden

Dan Wakil Preseiden 2014.” *Observasi* 11(2).

Yustiningrum, RR Emilia, and Wawan Ichwanuddin. 2015. “Partisipasi Politik Dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014.” *Jurnal Penelitian Politik* 12(1): 117–35.